

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 52
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), hlm. 52
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 82-85.
- Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT. Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 198.
- Djanis Djamin, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 56-57.
- E. Utrecht, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, Hlm. 17.
- Helmi, S.H., M.H., 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 28.
- Irham Fahmi, 2014, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 35.
- Ishaaq, 2017 *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 126
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 16
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 201
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 375.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama,, Bandung, Hlm. 175.

- ND Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 51.
- Muhaimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 104
- Peter Muhammad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 22.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 243.
- Philipus M. Hadjon, et.al, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, et.al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 245.
- Pramudya Sunu, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Gramedia, Jakarta, Hlm. 7.
- Ridwan HR., 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 262.
- Ridwan. HR., 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 294-296.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 136.
- Siagian P.S., 2003, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 30.
- Silalahi, D., 1996, *Hukum Alam Sekitar dan Implementasinya*, Alumni, Bandung, Hlm. 92.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 209.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 146.
- Soemarwoto, 1994, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, Hlm, Djambatan, Jakarta, Hlm.4
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, Hlm. 81.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 77-78.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, Hlm. 159.

W Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 218.

Y. Sri Pudyatmoko, *Dalam Perizinan : Problem Dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, Hlm. 11.

Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Yogyakarta, Hlm. 131.

**Jurnal :**

A'an efendi, "Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan", *Jurnal Hukum Risalah Hukum Fakultas hukum Universitas Mulawarman*, Vol. 7, No. 1, Hlm. 63.

Ary Fatanen, "Eksistensi Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 2.

Brandenburg, A.M., Carroll, M.S., "Your Place or Mine – The Effect of Place Creation On Environmental Values and Landscape Meanings", *Society & Natural Resources*, Vol. 8, No. 5, (1995) Hlm. 381-398

Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, Hlm. 227-250.

Edward James Sinaga, "Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vo. 6, No.3, Desember, 2017, Hlm. 329.

Endterwada, J., et.al., "A FrameWork For Understanding Social Science Contributions To Ecosystem Pengurusan", *Ecological Applications*, No. 8, Vol. 3, (1998), Hlm. 891-904

Feri Ardiansyah, "Tantangan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja" *Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP)*, Hlm. 15.

Firestone, J., "Agency Governance and Enforcement: The Influence of Mission On Environmental Decision Making", *Journal Of Policy Analysis & Pengurusan*, Vol. 21 No. 3, (2002), Hlm. 409-426.

Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz, Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 14, No. 3, Juli, 2004, Hlm. 302.

Nasrullah, et.al, "Efektivitas Pemberlakuan UU Cipta Kerja Dalam Pengelolaan Limbah B3",

*Jurnal Media Hukum*, Vol. 9, No.1, Maret, 2022, Hlm. 6.

Mo;, A.P.J., “The Environmental Movement In An Era Of Ecological Modernisation”,  
*Geoforum*, Vol. 31 No. 1, (February, 2000), Hlm. 45-56.

Muhamad Bilal, et.al, “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam *Omnibus Law* Terhadap  
Lingkungan Kegiatan Usaha”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4, No. 2, September, 2021,  
Hlm. 176.

Rangkuti, S.S., “Kajian Terhadap Perangkat Hukum Pembangunan Berwawasan Lingkungan,  
*ANDAL*, Vol. 7, No. 3, (1990), Hlm. 17.

Redclift, “Pathways To Sustainability?”, *Geography*, Vol. 87 No. 3, (2002), Hlm. 189-196.

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik”,  
*Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. 3, Agustus 2019, Hlm. 547.

Stepniewski, W. Horn, et.al, “Managing Soil Biophysical Properties For Environmental  
Protection”, *Agriculture Ecosystem & Environment*, Vol. 88 No. 2, (2002), Hlm. 175-  
181.

Suwandi Arham, “Omnibus Law Dalam Prespektif Hukum Indonesia”, *Petitim*, Vol. 7., No.  
1, 2019, Hlm. 117.

Ubaiyana, Kristina Viri, “Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-  
Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 19, No. 1, Mei, 2022,  
Hlm. 34.

W Richard Scott, *Approaching Adulthood: The Maturing of Institutional Theory*, Springer,  
Vol. 35 No.5

Wibisono, Andri Gunawan, 2018, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan  
Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara”,  
*Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, Hlm. 222.

Yakin, Sumardi Kamarol. 2017. “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai  
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law  
Journal*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2017, Hlm.113.

#### **Wawancara :**

Adithya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Bidang Penataan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Agustus 2023.

Arif, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Bidang Penataan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Agustus 2023.

Cici Desiana, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, bidang Tata lingkungan,  
*Wawancara*, Pada Tanggal 27 September 2023

Evi Rianti, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, bidang Penataan dan peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup, *Wawancara*, Pada tanggal 1 September 2023.

Lampiran Perizinan Perusahaan PT. X, Ditampilkan Oleh Adithya, Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Bandar Lampung, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan  
Hidup, Pada Tanggal 24 Agustus 2023

Mega Nur Fadhila, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, bidang Tata lingkungan,  
*Wawancara*, Pada tanggal 27 September 2023

Prof. Erlina B, S.H., M.H. Universitas Bandar Lampung, *wawancara*, Pada tanggal 27  
September 2023.

Wahyu Ramadhan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, bidang Pengendalian  
Kerusakan Lingkungan, *Wawancara*, Pada tanggal 1 September 2023

#### **Karya Tulis Ilmiah**

I Made Arya Utama, “Sistem hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam  
Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi terhadap Pemerintahan  
di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)” *Disertasi*, Program Pascasarjana  
Unpad, Bandung, 2006, Hlm. 120.

Maria Natalia Pangaribuan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan  
Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 di Kota Yogyakarta”  
*Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Hlm. 7.

Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah,  
Surabaya, November 2001, Hlm. 1.

Supriyono, Harry, “Kajian Yuridis Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan  
Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan”, *Disertasi*, November 2011,  
Universitas Indonesia, Hlm. 199.

#### **Internet :**

Kumparan.com, “WALHI : Kondisi Ekologis Kota Bandar Lampung Memprihatinkan”,  
[https://kumparan.com/lampunggeh/walhi-kondisi-ekologis-kota-bandar-lampung-  
semakin- memprihatinkan-1sf08KoUyAW](https://kumparan.com/lampunggeh/walhi-kondisi-ekologis-kota-bandar-lampung-semakin-memprihatinkan-1sf08KoUyAW), diakses pada 19 Mei 2023

P3DN, Daftar Perusahaan di Provinsi Lampung, [tkdn.kemenperin.go.id.](http://tkdn.kemenperin.go.id.), diakses pada 19 mei  
2023

Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2021, *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun  
2021-2026*, Bandar Lampung, Hlm. II-2.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 208 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 22 Angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pasal 22 ketentuan nomor 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada pasal 82C ayat (1).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 82A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Penjelasan Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko